



**STRATEGI MANAJEMEN PELAKU UMKM DALAM PENGELOLAAN SDM
DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**
Studi Kasus : Di Sektor Kreatif Wilayah Pemerintahan Kota Blitar
**MANAGEMENT STRATEGIES OF MSME ACTORS IN HUMAN
RESOURCE MANAGEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
PROTECTION**

Case Study : In the Creative Sector of the Blitar City Government Area

Sunan Trioko¹⁾, Ulva Roifatul Lailin^{*2)}, Cindy Ayu Amelia³⁾

Manajemen, Universitas Islam Balitar

JL. Imam Bonjol No. 16, Jl. Majapahit No.2- 4, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota
Blitar, Jawa Timur 66137

E-Mail: sunan3oko@gmail.com*

**Aksioma: Jurnal
Manajemen**

Vol. 4

No. 1

Halaman 1-9,

Bulan Februari, Tahun 2025

E-ISSN 2828-0997

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the strategies of human resource management (HR) and intellectual property rights (IPR) protection implemented by micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the creative wood sector, especially Griya Kayu. Data was collected through observation, documentation, and in-depth interviews. Research shows that hands-on training and productivity-based incentive systems are still used informally to manage human resources. Although the practice is effective, this method does not guarantee progress in the long run. Since more than 97% of the workforce in Indonesia is employed by MSMEs, which account for more than 60% of the national GDP as well as high costs and information limitations, most MSME manufacturers have not registered their product brands and designs. They rely more on publications, which do not have sufficient legal force, as proof that they are genuine. Due to information and cost limitations, IPR protection has not been a priority. Recommendations include training in human resource management and the government should facilitate IPR registration. The research not only identifies strategies and challenges faced by MSMEs, but also makes practical suggestions for the sustainable development of key barriers such as capital limitations, lack of legal understanding, and access to information. However, with the support of the government and strategic partners such as NGOs and educational institutions, there are opportunities. Some of the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) have succeeded in managing their businesses, including in the field of wooden handicraft accessories, drums, bags, and handicrafts sold around the Bungkarno Cemetery in Blitar City.

Keywords: MSME management; human resources; intellectual property rights; creative industry; Griya Kayu.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi strategi manajemen sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang diterapkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kreatif kayu, khususnya Griya Kayu. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan langsung dan sistem insentif berbasis produktivitas masih digunakan secara informal untuk mengelola sumber daya manusia. Meskipun praktiknya efektif, metode ini tidak menjamin kemajuan dalam jangka panjang. Karena lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia dipekerjakan oleh UMKM, yang menyumbang lebih dari 60% PDB nasional serta biaya tinggi dan keterbatasan informasi, sebagian besar produsen UMKM belum mendaftarkan merek dan desain produk. Mereka lebih mengandalkan publikasi, yang tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup, sebagai bukti bahwa mereka benar-benar asli. Karena keterbatasan informasi dan biaya, perlindungan HKI belum menjadi prioritas. Rekomendasi termasuk pelatihan manajemen sumber daya manusia dan pemerintah harus memfasilitasi pendaftaran HKI. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi strategi dan tantangan yang dihadapi UMKM, tetapi juga membuat saran praktis untuk pengembangan berkelanjutan dari hambatan utama seperti keterbatasan modal, kurangnya pemahaman hukum, dan akses ke informasi. Namun, dengan dukungan pemerintah dan mitra strategis seperti LSM dan lembaga pendidikan, terdapat peluang. Sebagian dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah berhasil dalam mengelola bisnis mereka, antara lain dalam bidang aksesoris kerajinan kayu, gendang, tas, dan kerajinan yang dijual di sekitar Makam Bungkarso Kota Blitar.

Kata Kunci: *Manajemen UMKM; SDM; HKI; Industri Kreatif; Griya Kayu.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dibantu oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia dipekerjakan oleh UMKM, yang menyumbang lebih dari 60% PDB nasional, sebagaimana yang diungkapkan oleh (Anastasya, 2023). Selain memiliki jumlah yang signifikan, UMKM memainkan peran penting dalam pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian kearifan lokal dan nilai-nilai budaya. Dalam hal ini, ekonomi kreatif semakin penting. Ekonomi kreatif terbukti dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal karena merupakan sektor yang berfokus pada kreativitas, keterampilan, dan inovasi (Ariansya dkk., 2024). Industri kerajinan kayu adalah salah satu sub sektor unggulan ekonomi kreatif. Heryadi dan Fajar dalam (Pratomo & Nasrulloh, 2019) produk berbasis kayu seperti furnitur, aksesoris, ukiran, dan hadiah menjadi ciri khas lokal Indonesia yang sangat dihargai di pasar domestik dan internasional.

Kelompok usaha Griya Kayu di Kota Blitar adalah contoh nyata dari potensi sektor ini. Griya Kayu menghasilkan berbagai produk bernilai seni dan fungsionalitas tinggi dengan menggunakan kayu sebagai bahan utama. Namun, Griya Kayu, seperti banyak UMKM lainnya, menghadapi masalah struktural dan manajerial yang menghambat kemajuan jangka panjang bisnis. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) adalah dua masalah utama yang menjadi perhatian. Dalam konteks UMKM Kreatif, manajemen sumber daya manusia seringkali dilakukan secara tidak terorganisir. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM biasanya bergantung pada pendekatan kekeluargaan,

pelatihan langsung di tempat kerja, dan sistem pengembangan SDM berbasis produktivitas (Paruli & Santosa, 2023). Metode ini lebih hemat biaya dan fleksibel, tetapi ia memiliki kelemahan dalam membangun kapasitas dalam jangka panjang.

Dalam aspek pengelolaan SDM, ditemukan bahwa sebagian besar UMKM kreatif masih mengandalkan sistem perekrutan berbasis kepercayaan dan hubungan personal, yang sering kali kurang memiliki standar profesional dalam pengelolaan tenaga kerja. Hal ini berimplikasi pada kurangnya pelatihan yang sistematis dan peningkatan kapasitas karyawan. Meskipun ada beberapa pelaku UMKM yang mulai menerapkan strategi pengembangan SDM berbasis keterampilan dan kompetensi, tantangan utama tetap pada keterbatasan akses terhadap sumber daya pelatihan yang memadai.

Nabawi dan Basuki (Paruli & Santosa, 2023) pengelolaan SDM UMKM sering menghadapi masalah seperti pemilik usaha yang tidak memiliki kapasitas manajemen yang cukup, kurangnya akses ke pelatihan dan sertifikasi kompetensi, dan tingkat turnover yang tinggi karena tidak adanya jenjang karir yang jelas. Selain itu, mengelola data dan menilai kinerja karyawan lebih sulit jika tidak ada dokumentasi atau sistem administrasi yang baik. Untuk UMKM kreatif seperti Griya Kayu, masalah SDM menjadi lebih sulit karena keterampilan produksi yang unik seringkali membutuhkan proses pembelajaran yang panjang (Dodi Sukmayana, 2023). Risiko kehilangan sumber daya produksi karena pergantian tenaga kerja juga meningkat jika bergantung pada orang-orang dengan keahlian teknis yang tinggi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kesinambungan bisnis, strategi manajemen SDM menjadi komponen penting.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Tantangannya: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah masalah kedua yang sangat penting. HKI sangat penting dalam industri kreatif untuk memastikan bahwa inovasi dan hasil usaha tidak digunakan secara ilegal oleh pihak lain. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa UMKM kurang memahami HKI. Banyak pengusaha kecil dan menengah (UMKM) tidak menyadari pentingnya pendaftaran merek, desain industri, dan hak cipta untuk produk mereka. Ini meningkatkan kemungkinan plagiarisme, pencurian ide, dan ketidakmampuan bersaing di pasar yang lebih luas (Lestari dkk., 2024). Sebaliknya, alasan utama pelaku UMKM untuk tidak mendaftar adalah biaya tinggi untuk pengurusan HKI, prosedur administrasi yang rumit, dan keterbatasan informasi. Akibatnya, mereka lebih cenderung bergantung pada bukti yang tidak resmi, seperti tanggal publikasi media sosial atau testimoni pelanggan, sebagai bukti orisinalitas (Bayani & Santoso, 2024). Bukti seperti itu tidak cukup kuat secara hukum di pengadilan.

Sementara itu, dalam aspek perlindungan HKI, observasi menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya hak cipta dan paten masih rendah di kalangan pelaku UMKM. Banyak usaha kreatif menghasilkan produk dengan nilai inovatif tinggi, tetapi kurang memahami prosedur legal dalam melindungi aset intelektual mereka. Salah satu temuan penting adalah adanya praktik peniruan desain dan produk yang cukup marak, menyebabkan kerugian bagi UMKM yang tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat.

Namun, beberapa UMKM yang lebih maju telah mulai menerapkan strategi pendaftaran merek dan hak cipta sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan usaha. Mereka bekerja sama dengan instansi terkait dalam mengakses layanan konsultasi HKI, meskipun masih terdapat kendala dalam birokrasi dan biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pendaftaran tersebut.

Produk berbasis desain memiliki potensi untuk meningkatkan nilai bagi bisnis seperti Griya Kayu. Namun, jika produk tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, orang lain dapat menyalinnya tanpa mendapatkan kompensasi. Hal ini tidak hanya berdampak negatif pada ekonomi tetapi juga mengurangi keinginan untuk mengembangkan ide-ide baru. Penelitian ini sangat relevan karena pentingnya pengelolaan SDM dan perlindungan HKI untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah (UMKM). Studi kasus Griya Kayu memberikan gambaran langsung tentang proses dan hambatan di industri kreatif berbasis kayu. Penelitian ini tidak hanya menekankan masalah yang ada, tetapi juga meneliti solusi yang mungkin untuk UMKM internal dan intervensi eksternal seperti pemerintah, LSM, dan institusi

pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu membuat kebijakan dan pedoman praktis untuk pelaku UMKM serupa di daerah lain dengan karakteristik serupa.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks melalui penelitian langsung di lapangan (Lailin, Haryanti, dkk., 2024). Metode ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam fenomena sosial dan praktik (Atkinson, 2017). Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap strategi manajemen pelaku UMKM dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Studi kasus berfokus pada sektor kreatif di Kota Blitar, yang memiliki karakteristik unik dalam ekosistem usahanya, sehingga memerlukan pemahaman kontekstual yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan metode kuantitatif.

Pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan dalam menggali perspektif pelaku usaha, memahami tantangan yang mereka hadapi, serta mengeksplorasi strategi yang diterapkan dalam mengelola SDM dan menjaga HKI. Dengan metode studi kasus, penelitian ini dapat menghasilkan data yang kaya dan komprehensif mengenai praktik manajemen yang dilakukan oleh UMKM kreatif, sehingga tidak hanya menggambarkan fenomena tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana praktik tersebut berlangsung dalam realitas bisnis.

Tempat penelitian adalah Griya Kayu, Salah satu sentra UMKM Griya pusat kerajinan kayu di sekitar Kota Blitar. Lokasi dipilih secara *purposive* (bertujuan) karena Griya Kayu mewakili ciri khas UMKM sektor kreatif berbasis kayu. Dalam penelitian ini, unit analisis termasuk pelaku usaha (pemilik), tenaga kerja (pekerja), dan pihak terkait lainnya, seperti asosiasi, pengrajin lokal, dan lembaga pembina pemerintah daerah.

Observasi, dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur adalah metode pengumpulan data. Model interaktif Miles dan Huberman (Irmayanti, Rismayadi, & Pertiwi, 2023) digunakan untuk melakukan analisis data, yang mencakup pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Teknik Analisis Data: Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengidentifikasi pola, tema, dan kecenderungan dalam praktik manajemen SDM dan HKI di lingkungan UMKM adalah tujuan dari analisis ini. Untuk meningkatkan keabsahan dan validitas data, teknik triangulasi yang berarti membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data (observasi, dokumentasi, wawancara) digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas produk dan kemampuan manajemen serta perlindungan hukum terhadap inovasi adalah faktor penting dalam keberhasilan UMKM. Menurut Rudianto (2023), UMKM dengan sistem manajemen SDM yang baik cenderung lebih produktif dan tahan lama. Sementara itu, penelitian (Pratomo & Nasrulloh, 2019) menunjukkan betapa pentingnya HKI sebagai alat strategis untuk membuat UMKM lebih kompetitif di era digital. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada elemen makro, seperti kerangka hukum atau kebijakan nasional. Tidak banyak penelitian yang mempelajari praktik langsung di tingkat pelaku usaha, terutama di industri kreatif berbasis komunitas seperti Griya Kayu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah ini dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang mendalam.

Strategi Manajemen Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Strategi UMKM berbeda dari perusahaan besar. Menurut Minto-Coy, Cowell, & McLeod (2016), keunggulan biaya, diferensiasi, atau fokus pasar dapat menjadi titik fokus strategi kompetitif UMKM. Untuk memenangkan persaingan dalam industri kreatif, strategi desain dan kreativitas yang berbeda sangat penting. Menurut Kotler, P., & Keller (2016), membuat produk unik berdasarkan nilai budaya lokal dapat meningkatkan persepsi konsumen tentang kualitas dan keunikan produk. Bahagia et al. (2024) mengemukakan bahwa perencanaan strategis, yang mencakup analisis

kekuatan dan kelemahan internal, peluang dan ancaman eksternal, dan kekuatan dan kelemahan eksternal, sangat penting untuk keberhasilan usaha kecil dan menengah (UMKM). Dodi Sukmayana (2023) menunjukkan bahwa UMKM yang bergerak di industri kerajinan kayu menghadapi masalah dalam hal keberlanjutan bahan baku, teknologi produksi, dan akses pasar. Akibatnya, dibutuhkan pendekatan manajemen yang fleksibel yang didukung oleh ekosistem yang mendukung, termasuk pemerintah daerah dan komunitas kreatif.

Penelitian ini menggali integrasi antara strategi manajemen SDM dan perlindungan HKI, yang sering kali dikaji secara terpisah. Dengan menggabungkan dua aspek ini, penelitian bertujuan memberikan model pengelolaan yang lebih komprehensif bagi pelaku UMKM, sehingga mereka tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja tetapi juga melindungi hak atas inovasi dan kreativitas mereka. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam UMKM Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melindungi hasil kreatif individu atau kelompok, seperti hak cipta, merek dagang, dan desain industri. Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2021), tingkat pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual oleh UMKM sangat rendah dibandingkan dengan seluruh pelaku usaha di Indonesia. Pratomo & Nasrulloh (2019) menyatakan bahwa banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) belum menyadari pentingnya HKI untuk menjaga daya saing dan keunikan produk. Akibatnya, banyak produk inovatif dibuat secara tidak sah dan merugikan pemilik asli. Hambatan utama adalah kurangnya literasi hukum, proses administrasi yang dianggap rumit, dan biaya pendaftaran.

Selanjutnya, Peran Pemerintah dan Stakeholder Pendukung Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem usaha yang mendukung pengembangan UMKM, termasuk dalam bidang SDM dan HKI (Nuryanuarifa dkk., 2024). Pemerintah pusat dan daerah terus meningkatkan program pelatihan, bantuan pendaftaran HKI, dan inkubasi usaha. Menurut Lailin, Mei, et al. (2024) menyatakan bahwa pemerintah, sektor pendidikan, dan LSM harus bekerja sama untuk sukses UMKM. Kolaborasi ini penting dalam memberikan pendampingan teknis, instruksi hukum, dan bantuan akses pasar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi dan menilai strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang digunakan oleh pelaku UMKM di industri kreatif kayu, dengan penekanan khusus pada sistem yang digunakan untuk merekrut, memberikan pelatihan, dan meningkatkan kompetensi karyawan (Ikwera & Twongyirwe, 2019). Mengidentifikasi tingkat perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang ada, seperti hak cipta, pendaftaran merek, dan perlindungan desain industri. Mengidentifikasi dan menjelaskan masalah utama yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam proses pengelolaan SDM dan pendaftaran HKI, seperti keterbatasan sumber daya, informasi, dan akses ke institusi yang relevan. Merumuskan kebijakan dan strategi praktis yang dapat diterapkan oleh UMKM, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efisiensi manajemen sumber daya manusia, memperkuat perlindungan HKI, dan mendukung keberlanjutan dan daya saing industri kreatif kayu.

Studi/ penelitian ini menemukan beberapa temuan penting mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pada UMKM di industri kreatif kayu di Kota Blitar. Temuan dibagi menjadi dua fokus utama: (1) Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia; dan (2) Praktik dan Tantangan Perlindungan HKI.

1. Strategi Manajemen SDM pada UMKM Griya Kayu

Sebagian besar UMKM di industri kerajinan kayu Kota Blitar mengelola sumber daya manusia secara informal tanpa struktur organisasi formal atau kebijakan SDM tertulis. Pelaku UMKM menggunakan strategi manajemen SDM non-formal. Proses pengangkatan dilakukan melalui jejaring sosial lokal (Roifatul Lailin dkk., 2023). Pelatihan diberikan secara langsung di tempat kerja. Meskipun tidak terstruktur, pengembangan kompetensi bergantung pada pengalaman. Hasil produksi adalah dasar sistem kompensasi; itu meningkatkan motivasi tetapi tidak memberikan jaminan kesejahteraan jangka panjang (Baculáková, 2008). Untuk membuat proses kerja lebih terorganisir dan efisien, struktur manajemen SDM harus diperkuat.

- a. Pelatihan Berbasis Praktik Langsung (*On-The-Job Training*): UMKM biasanya menggunakan metode pelatihan langsung di tempat kerja. Pelatihan diberikan secara lisan dan praktik selama proses produksi. Pelaku usaha menyatakan bahwa metode ini lebih efektif karena membentuk keterampilan dasar karyawan dengan cepat dan hemat biaya.
- b. Sistem Insentif Produktivitas: Sistem ini biasanya berdasarkan output. Pekerja diberi kompensasi berdasarkan jumlah produk yang dibuat atau diselesaikan. Tidak ada sistem untuk pengelolaan kinerja atau pengembangan karier jangka panjang meskipun sistem ini meningkatkan motivasi kerja dalam jangka pendek.
- c. Tidak ada dokumentasi dan struktur SDM di UMKM. Tidak ada deskripsi pekerjaan, sistem evaluasi kinerja, atau standar operasional prosedur (SOP) tertulis. Hal ini membuat proses kerja sangat bergantung pada pemilik dan sulit untuk diukur.
- d. Tingkat Perputaran Tenaga Kerja Tinggi: Beberapa pemilik bisnis mengatakan mereka menghadapi kesulitan untuk mempertahankan karyawan yang berpengalaman. Siklus regenerasi yang tidak stabil terjadi karena banyak pekerja keluar setelah memperoleh keterampilan dasar dan mendirikan bisnis sendiri.

2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kebanyakan pelaku tidak secara resmi mendaftarkan merek dagang atau desain produk mereka (Gannon et al, 2022). Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi tentang prosedur pendaftaran dan dianggap mahal biaya pendaftaran. Beberapa pelaku percaya bahwa rekaman publikasi di media sosial menunjukkan keaslian desain. Namun, ini belum memberikan perlindungan hukum yang cukup. Selain mendapatkan bantuan teknis dan finansial selama proses pendaftaran HKI, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya HKI.

- a. Kesadaran HKI Rendah: Sebagian besar pelaku UMKM tidak memahami pentingnya mendaftarkan hak cipta, merek, atau desain produk. Mereka percaya bahwa mengikuti pameran atau berpartisipasi di media sosial adalah bukti cukup untuk menjadi unik.
- b. Biaya dan Prosedur Pendaftaran Dianggap Menghambat: Pemilik usaha mengeluh tentang proses administrasi yang rumit dan biaya tinggi untuk pendaftaran HKI. Ini merupakan kendala utama untuk melindungi hasil karya secara hukum.
- c. Risiko Peniruan Produk Tinggi: Beberapa pelaku usaha mengatakan bahwa desain dan merek produk mereka telah ditiru. Namun, karena mereka tidak memiliki sertifikat HKI, mereka tidak dapat mengambil tindakan hukum.

Ada beberapa tantangan utama, seperti kekurangan modal, pengetahuan tentang hukum HKI, dan kemampuan untuk mendapatkan pelatihan sumber daya manusia. Selain itu sebagai usaha yang sedang berkembang kepentingan, akan pertumbuhan ekonomi dicapai dengan mengorbankan kualitas lingkungan karena pendapatan yang lebih besar lebih diutamakan dibandingkan dengan lingkungan yang bersih. Ini adalah penjelasan logis untuk asosiasi positif antara keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi (Yusuf, 2023). Alasannya adalah bahwa para bebisnis memberikan prioritas yang lebih tinggi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada meminimalkan kerusakan ekologi. Di sisi lain, ada peluang, seperti program pemerintah terkait digitalisasi dan ekonomi kreatif, serta dukungan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dapat membantu mendapatkan dana dan informasi (Wiryono dkk., 2015). Selain itu, penggunaan platform digital membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk dipromosikan, dididik, dan bekerja sama satu sama lain.

Keberhasilan UMKM Lokal antara lain banyak UMKM di Griya Kayu yang berhasil dalam manajemen usaha meskipun menghadapi banyak tantangan. Sebagai contoh, produsen gendang, aksesori, dan tas kayu yang dijual di sekitar kawasan wisata Makam Bung Karno telah menggunakan strategi *branding* dan kerja sama pemasaran melalui media digital. Selain itu, mereka bekerja sama dengan komunitas kreatif lokal dan lembaga pelatihan vokasional, yang secara tidak langsung meningkatkan kemampuan SDM dan mempromosikan produk. Peningkatan permintaan pasar dan peluang ekspor telah meningkatkan kesadaran tentang HKI, meskipun beberapa dari mereka belum terdaftar secara resmi. Beberapa pelaku usaha mengatakan bahwa pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota

Blitar membantu mereka itu salah satu wujud peran dari Pemerintah dan *Stakeholder*. Mereka melihat, bagaimanapun, bahwa program tersebut masih bersifat umum dan belum mencapai masalah khusus seperti manajemen SDM secara teknis dan HKI. Meskipun ada potensi peningkatan, dukungan dari LSM dan institusi pendidikan tinggi masih terbatas.

KESIMPULAN

Studi Penelitian ini menemukan bahwa UMKM di industri kreatif kayu, khususnya di Kota Blitar, menghadapi masalah dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Melalui pelatihan langsung di tempat kerja (*on-the-job training*) dan sistem kompensasi berbasis produktivitas, manajemen sumber daya manusia masih bersifat informal. Meskipun metode ini efisien dan hemat biaya, ia tidak dapat menjamin peningkatan keterampilan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Karena kurangnya dokumentasi dan sistem manajemen formal, UMKM sulit melakukan standarisasi dan regenerasi tenaga kerja, dan mereka rawan tergantung pada pemilik usaha.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi pelaku UMKM terkait strategi manajemen SDM yang efektif dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi. Banyak UMKM di sektor kreatif masih menghadapi kendala dalam pengelolaan tenaga kerja, terutama dalam hal rekrutmen, pelatihan, dan peningkatan kapasitas. Dengan menghadirkan strategi berbasis penelitian, UMKM dapat memperoleh wawasan mengenai model pengelolaan SDM yang lebih berkelanjutan.

Selanjutnya, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan HKI. Sektor kreatif memiliki tantangan besar dalam menjaga orisinalitas dan mencegah pelanggaran hak cipta. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana pelaku usaha dapat menerapkan mekanisme perlindungan yang tepat, serta bagaimana kebijakan daerah dapat mendukung proses registrasi HKI yang lebih mudah dan terjangkau. Penggunaan pendekatan studi kasus yang memungkinkan eksplorasi mendalam tentang praktik manajemen yang diterapkan oleh UMKM kreatif di Kota Blitar. Dengan menghadirkan data empiris dari kondisi nyata, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang program pemberdayaan UMKM yang lebih tepat sasaran.

Tidak banyak orang yang tahu tentang pentingnya HKI, dan banyak bisnis belum mendaftarkan merek atau desain produk karena biaya, keterbatasan informasi, dan anggapan bahwa itu tidak penting. Pengelolaan SDM di UMKM Griya Kayu sederhana namun sesuai dengan lingkungan lokal. Karena pemahaman yang rendah dan keterbatasan biaya, perlindungan HKI masih rendah. Pelatihan manajemen, peningkatan struktur organisasi, dan dukungan HKI dari pemerintah dan mitra strategis dapat membuka peluang untuk kemajuan. Karena tidak adanya sertifikat hak kekayaan intelektual yang sah, risiko plagiarisme dan peniruan produk sangat tinggi. Di sisi lain, perlindungan hukum tidak dapat dilakukan. Terlihat dari beberapa bisnis yang mulai menerapkan strategi branding, kolaborasi komunitas, dan pemanfaatan teknologi digital, ada potensi besar untuk berkembang. Selain itu, masih ada ruang untuk mengoptimalkan dukungan dari pemerintah dan mitra strategis (LSM, institusi pendidikan). Penelitian ini berhasil mengidentifikasi strategi dan tantangan yang dihadapi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasya. (2023). *Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. di akses dari UKMINDONESIA.ID Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia.*
- Arliansya, Y. P., Adha, F., Arifah, S., Rofi, M., Mutaqin, J., Ghany, A., Octa, A., Zulpiani, I., Ningtyas, P., Ilma, S. A., & Rien, B. (2024). Empowerment And Development Of Micro , Small And Medium Enterprises And Processing Of Banana Sale Products. *Unram*, 2(April), 108–119.
- Atkinson, J. D. (2017). *Qualitative Methods. In Journey into Social Activism: Qualitative Approaches.* Fordham University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1hfr0rk.6>

- Baculáková, K. (2008). CLUSTER ANALYSIS OF CREATIVE INDUSTRIES IN THE REGIONS AND DISTRICTS OF SLOVAKIA Kristína. *Anul*, 3(8), 74–89.
- Bahagia, D. S., Numan, A., & Saputra, S. (2024). Strategi Perencanaan Bisnis untuk Meningkatkan Keberhasilan UMKM. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(3), 123–130. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i3.41>
- Bayani, K. N., & Santoso, B. (2024). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif UMKM di Jawa Timur. *Unes Law Review*, 6(3), 9519–9526. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual*. (2021). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DIKI.
- Dodi Sukmayana. (2023). Analisis Potensi Pasar Global Bagi Produk Kehutanan: Peluang Dan Tantangan Bagi Pengusaha Bisnis Kayu Dan Hasil Hutan Lainnya. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 274–285. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i2.30422>
- Gannon, K. E., Eskander, S. M. S. U., Avila-Uribe, A., Castellano, E., Diop, M., & Agol, D. (2022). The role of gender in firm-level climate change adaptation behaviour: Insights from small businesses in Senegal and Kenya. *Southern Economics Association Conference Paper. 22nd November*, 48, 100699. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2025.100699>
- Ikwera, R., & Twongyirwe, R. (2019). Facilitating social enterprise development through collective marketing: insights from Bukonzo Joint Co-operative Union, Western Uganda. *Journal of Fair Trade*, 1(1), 13–26. <https://doi.org/10.13169/jfairtrade.1.1.0013>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *A framework for marketing management*.
- Lailin, U. R., Haryanti, N., & Ardiansyah, R. S. (2024). Peran Administrasi Publik Dan Komunikasi Publik Dalam Membangun Kolaborasi Antara Kelompok Masyarakat (Pokmas Mulya Abadi) Dan Pemerintah Guna Pembangunan Kelurahan. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 215–232. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1634>
- Lailin, U. R., Mei, P. C., & Puswandari, R. D. (2024). Prinsip Good Governance Guna Pengelolaan Akuntansi Publik dan Pengawasan pada Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar masalah penting di banyak negara , termasuk Indonesia . Konsep tata kelola yang baik , dan akuntabel adalah bagian penting. *TRANSGENERA: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 2, 51–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/transgenera.v2i1.4124>
- Lestari, N. S., Rosman, D., & Triana, I. (2024). Analyzing the Effect of Innovation and Strategic Planning on MSME Performance, Utilizing Technology Adoption as a Moderator. *Procedia Computer Science*, 245(C), 500–507. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.10.276>
- Miles, M. Huberman, A. M., & Saldaña, J. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Nuryanuarifa, D., Maharani, W. M., & Lailin, U. R. (2024). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan. *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, 2(2).
- Paruli, E., & Santosa, W. (2023). Efek Mediasi Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Hubungan Implementasi Manajemen Rantai Pasok Dengan Kinerja Umkm Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2279–2288. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.16862>
- Porter Michael E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. *New York: Free Press*, 399–404.
- Pratomo, S. A., & Nasrulloh, R. S. (2019). ANALISIS STANDARISASI PRODUK DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI PEMETAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAERAH JAWA TENGAH. *Makro: Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(2), 133–149. <https://doi.org/10.36467/makro.2019.04.02.02>
- Roifatul Lailin, U., Reta Kusumawijayanti, A., Dyan Nofa Harumike, Y., & Lailatus Saadah, D. (2023). Use Of Instagram Social Media As Blitar City Government Branding Program (Rt Keren Case Study Program, Bendogerit Village). *International Journal of Science, Technology & Management*, 4(6), 1713–1717. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i6.1012>
- Rudianto, Z. R. V. (2023). Strategi Pemasaran Digital Bagi UMKM Untuk Meningkatkan Daya Saing (Studi Kasus Pada UMKMDi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)*, 2(2), 449–456.

- Wiryono, S. K., Susatyo, H., Utomo, S., Suryanta, B., Sudrajad, O. Y., Lazuardi, K. M., & Yuanita, H. (2015). Risk Mapping on Dynamics Creative Industry: Case Study at Bandung City, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 169(August 2014), 125–130. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.292>
- Yusuf, A. (2023). Dynamic effects of energy consumption, economic growth, international trade and urbanization on environmental degradation in Nigeria. *Energy Strategy Reviews*, 50(October), 101228. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101228>